

PORNOGRAFI: ANTARA KEPEMILIKAN DAN DOMINASI TUBUH

Mukalam*

Abstract

Pornography denotes the controversial issue. The controversies happen because of the issue in the unclear cut position, for instance, the problem of definition. The definition of pornography is not so easy either in term of ethymology or terminology. In other words there is no an agreement regarding its definition. It also involves the other dimensions, for example political dimension, that of morality, religion, law, social, esthetic, and gender. In this sense, it emerges controversies in term of how to mean the gender equality. The question is what the meaning of gender equality? Does pornography happens because of inequality or conversely?

Kata kunci: pronogarfi, ketidaksetaraan, gender, dan feminisme

I. Pendahuluan

Tak dimungkiri bahwa pornografi merupakan persoalan yang selalu mengundang kontroversi. Kontroversi ini terjadi antara lain karena ia berada dalam suatu wilayah 'abu-abu' sehingga tidak mudah untuk didefinisikan dan selalu melibatkan dimensi-dimensi lain seperti politik, moralitas, agama, hukum, sosial, estetika, dan gender. Definisi umum yang menyatakan bahwa pornografi adalah material seksual eksplisit dan didesain untuk membangkitkan nafsu seksual, tak kunjung mengurangi silang pendapat di seputar hakikat pornografi. Orang berbeda pendapat tentang apa yang disebut dengan material yang nyata-nyata seksual, dan apa yang dimaksud dengan membangkitkan nafsu seksual.

*Penulis adalah alumnus S2 Filsafat Universitas Gadjah Mada dan Peneliti pada *Intertextual Studies for Civilization* (ISC) Yogyakarta.

Justice Steward pernah mengatakan, 'saya tidak dapat mendefinisikan pornografi, tetapi saya mengetahuinya ketika saya melihatnya'.¹ Nampaknya ungkapan ini mengemuka dikarenakan memang tidak mudah untuk menentukan batas-batas tegas tentang apa yang disebut pornografi. Diana H. Russell² mendefinisikan pornografi sebagai material yang mengombinasikan seks dan atau mempertontonkan alat kelamin dengan menyalahgunakan atau mendegradasi dalam suatu cara yang nyata-nyata membangkitkan, menimbulkan atau mendorong tindakan seksual. Definisi ini menekankan dua unsur penting yaitu material yang nyata-nyata seksual yang disalahgunakan dan bisa membangkitkan nafsu seksual.

Secara etimologis, pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne*, yang berarti perempuan pelacur, dan *grapōs*, yang berarti tulisan, goresan, atau lukisan. Namun demikian pada saat sekarang definisi etimologis ini sangat tidak memadai dalam menjelaskan arti pornografi. Obyek pornografi pada saat sekarang tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki, anak-anak, dan juga waria. Sementara itu material pornografi telah meluas melampaui bentuk tulisan, goresan, atau lukisan.

Walaupun tidak secara langsung menyangkut hidup dan matinya individu atau kelompok, kasus pornografi seperti selalu menyergap kesadaran untuk membuat pilihan antara ya dan tidak, boleh dan tidak boleh. Seiring itu benda-benda pornografi terus mengalir deras dengan tiada henti. Revolusi media massa merupakan faktor menentukan bagi industri pornografi untuk menyeruak dalam berbagai medium teknologi seperti video, game computer, manipulasi foto, internet; dan beranak-pinak dalam sub-genre seperti pornografi amatir, pornografi anak, pornografi fetis, pornografi hentai semisal kartun dan animasi, pornografi homoseksual semisal gay dan lesbian, pornografi orgi, pornografi yang berorientasi ras, dan pornografi tekstual.

Bagi sekelompok orang, isu pornografi adalah persoalan kebebasan dan privasi, tetapi bagi kelompok yang lain merupakan bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi sehingga diperlukan regulasi. Hampir di setiap komunitas masyarakat, dua jenis kelompok ini bisa dijumpai. Kelompok pendukung kebebasan berekspresi biasanya terdiri dari warga sipil bebas seperti seniman dan komunitas kreatif yang membutuhkan kebebasan artistik untuk bisa bekerja. Sementara itu, kelompok pendukung regulasi biasanya terdiri dari para aktivis hukum yang mendukung sensor atas nama negara dan kelompok religius yang berusaha menjaga keyakinannya.³

¹ Byron W. Daynes, *Pornography: Freedom or Societal Degradation?*, Social Regulatory Policy, Raymond Tatalov & Byron W. Daynes (ed.), Bulder and London: Westview Press, hlm. 41

² Esther D. Reed, 1994, *Pornography and The End of Morality*, Studies in Christian Ethics, Volume 7 No 2, hlm. 66

³ Thelma McCormack, 1993, *If Pornography Is the Theory, Is Inequality the Practice?*, Philosophy of the Social Sciences, Vol. 23 No. 3, September, hlm. 299

Dalam konteks gerakan feminis, wacana pornografi seolah menjadi titik pembelah antara kelompok liberal yang menganggap bahwa pornografi merupakan hak perempuan untuk mengekspresikan diri secara bebas dan kelompok radikal yang menganggap pornografi sebagai bentuk dehumanisasi dan dominasi sistem patriarki terhadap perempuan. Buku *XXX: Woman's Right to Pornography* (1995) karya Wendy McElroy merupakan penyokong penting posisi kelompok liberal walau oleh penulisnya diposisikan dalam kelompok feminis pro-seks. Sementara itu buku *Pornography: Woman, Violence and Civil Liberties* (1992) yang dieditori Catherine Itzin, di mana Catherine MacKinnon merupakan kontributor penting bisa ditempatkan sebagai representasi kelompok feminis radikal dalam menolak pornografi.

Satu hal yang menarik dari perbedaan antara feminis liberal dan feminis radikal dalam kasus pornografi adalah mereka sedang memperjuangkan hal yang sama yaitu kesetaraan gender (*gender equality*) dan menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam sistem sosial yang luas. Pornografi merupakan isu yang berkaitan dengan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Pertanyaan penting yang bisa diajukan adalah pada tingkat apa keduanya berbeda dan bagaimana memahami perbedaan tersebut dalam konteks kesetaraan.

II. Tubuh Perempuan, Hak Perempuan

Feminis liberal merupakan kelanjutan dari gerakan feminis pada tahun 1960-an yang menginginkan kesetaraan perempuan terhadap laki-laki. Kesetaraan tersebut, menurut Wendy McElroy, diraih tidak dengan merusak sistem, tetapi melalui aksi afirmatif, karena mereka beranggapan bahwa laki-laki pada hakikatnya tidak menindas dan tidak keras kepala. Prinsip kelompok liberal adalah 'tubuh perempuan, hak perempuan'. Perempuan memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan juga hak untuk mengekspresikannya. Prinsip inilah yang antara lain juga mendasari seluruh argumen yang berkaitan dengan ketubuhannya seperti aborsi, hamil, sampai dengan kebebasan gaya hidup secara seksual seperti menjadi lesbian atau tidak menikah.⁴

Di kalangan feminis liberal, perempuan dianggap sebagai punya hak atas pornografi, yaitu hak untuk membuat, mempublikasikan, mempertontonkan, mendistribusikan, dan mengkonsumsi dalam ruang privat. Perempuan dianggap memiliki hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk membuat pilihan dalam mengekspresikannya, serta menolak setiap bentuk sensor dan pembatasan yang dilakukan oleh negara, dan juga sensor dalam bentuk lain seperti sensor ekonomi, sensor organisasi kultural, dan bahkan sensor-diri. Sikap ini diambil oleh feminis liberal sebagai reaksi atas pemikiran 'moralisme legal' dan 'paternalisme legal'. Dalam pemikiran moralisme legal,

⁴ Wendy McElroy, 1997, *A Feminist Defense of Pornography*, Free Inquiry Magazine, Volume 17 nomor 4, hlm. 24.

negara berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksakan suatu keyakinan moral dan mencegah warganya terjerumus dalam aktivitas yang merendahkan moral. Sementara itu menurut paternalisme legal, pemerintah dianggap memiliki hak untuk mencegah warganya dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya, bahkan sekalipun warga tersebut telah dewasa.

Menurut feminis liberal, negara tidak berhak untuk memaksakan sebuah pilihan moral, termasuk bila itu merupakan moral mayoritas. Ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak seseorang untuk bebas berekspresi dan menentukan pilihan. Posisi negara justru harus menjadi pelindung setiap individu untuk bebas berekspresi dan melindungi kekerasan dan pemaksaan dari pihak lain, bukan malah memaksakan sebuah pilihan moral tertentu. Negara tidak berhak melarang dan membrangus ekspresi kreatif individu. Pemerintah yang baik, dalam bahasa John Stuart Mill, adalah pemerintah yang sedikit memerintah.⁵

Setidaknya ada dua alasan yang digunakan kelompok liberal untuk menolak setiap bentuk sensor dan pembatasan yang dilakukan oleh negara, yaitu (i) alasan hak kebebasan berekspresi, dan (ii) hak untuk memperoleh privasi. Kelompok feminis liberal memperjuangkan hak atas pornografi sebagai kebebasan berekspresi. Satu hal yang menjadi titik tekan bagi kelompok ini adalah kata hak dan bukan materialnya. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara harus mendapatkan hak rasa aman untuk mengekspresikan dirinya, sekalipun hal tersebut salah atau negatif. Kesalahan dan kenegatifan sebuah ekspresi bukan suatu alasan untuk melarang kemerdekaan berekspresi sebagai hak dasar. Seiring hal tersebut, hak atas privasi menjadi penting. Individu berhak atas ruang privasi untuk mengikuti keyakinan dan mengeksplorasi cita rasa pribadi yang bebas dari tekanan dan paksaan atau intervensi dari individu lain dan negara.

Hal penting yang hendak diperjuangkan oleh feminis liberal adalah bukan pornografi itu sendiri, sebagaimana banyak disalah-pahami berbagai pihak, tetapi hak atas pornografi. Maka tak mengherankan bila seorang feminis liberal mengatakan bahwa sebagai perempuan ia merasa jijik melihat majalah Play Boy, tetapi sebagai penulis ia memahami pentingnya kebebasan berekspresi. Idealitas yang hendak ditegakkan oleh feminis liberal adalah moralitas voltairean, bahwa 'aku tidak menyetujui apa yang kau katakan, tetapi aku akan mempertahankan sampai mati hakmu untuk berbicara'. Hak tersebut harus dijamin untuk menghindari pemaksaan dan represi pihak lain yang membahayakan eksistensi individu.

Feminis liberal sedang memperjuangkan kebebasan berekspresi, dan bukan pornografi. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Kebebasan

⁵ Thelma McCormack, 1993, *If Pornography Is the Theory, Is Inequality the Practice*, hlm. 318.

berekspresi adalah fondasi, sementara pornografi hanyalah konsekuensi. Maka tak mengherankan, kadang mereka juga menempatkan pornografi dalam suatu level penilaian yang rendah dalam pengertian merupakan material yang memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding karya seni, karya intelektual, karya sastra. Namun demikian, level yang rendah ini bukan merupakan suatu alasan untuk memproteksinya. Mereka menganggap bahwa pornografi merupakan material yang terbatas konsumennya, tidak mempublik seperti karya seni dan intelektual.

IV. Dominasi Tubuh

Bila kelompok feminis liberal menempatkan persoalan pornografi dalam konteks kebebasan individu berekspresi dan seolah menghindari dari upaya untuk mendefinisikan apa itu pornografi, maka kelompok feminis radikal menempatkan perkara pornografi dalam struktur sosial dan sangat berkepentingan dengan definisi untuk mengurai benang kusut pengertian pornografi. Pornografi dilihat sebagai salah satu bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap perempuan dalam sistem global kapitalis yang bernama kultur patriarki. Kultur ini menempatkan perempuan sebagai obyek dan *the second sex*. Pornografi bukan sesuatu yang netral tetapi sarat dengan kepentingan ideologi dominasi.

Dalam pornografi, menurut Andrea Dworkin dan Catherine MacKinnon, dua tokoh penting feminis radikal, perempuan mengalami proses dehumanisasi, menjadi penerima pasif perlakuan laki-laki. Semua representasi pornografi dalam aktivitas yang berbasis pada hubungan heteroseksual membahayakan semua perempuan karena ketidaksetaraan diseksualisasikan dalam subordinasi perempuan demi kenikmatan seksual. Dalam satu kalimat dikatakan 'pornografi mengerotiskan hirarki, menseksualkan ketidaksetaraan, menciptakan dominasi dan kepatuhan seks'.⁶

Bagi keduanya, kepatuhan seksual merupakan prototype dari semua jenis kepatuhan baik itu dalam pornografi atau dalam bentuk pelukisan kultur yang lain. Dalam masyarakat patriarki seksualitas perempuan diubah menjadi sama dengan seksualitas laki-laki. McKinnon menyatakan bahwa pornografi merupakan sebuah sarana melalui mana seksualitas secara social dikonstruksi. Pornografi mengkonstruksi perempuan sebagai benda untuk digunakan secara seksual. Bahkan, menurutnya, klasifikasi yang dibuat dalam industri pornografi seperti *black woman, asian woman, latin woman, pregnant women, old woman, fat woman* dan lain-lain telah menempatkan perempuan lebih rendah dari binatang dan benda. Perempuan tidak memiliki

⁶ Esther D. Reed, 1994, *Pornography and The End of Morality*, hlm. 68

hak untuk mencitrakan dirinya sebagai keibuan, atletik, feminis dan lain-lain.⁷

Berangkat dari asumsi-asumsi ini, Andrea Dworkin dan Catherine MacKinnon mendefinisikan pornografi sebagai 'grafis yang secara seksual eksplisit mensubordinasi perempuan, melalui gambar dan/atau kata-kata'.⁸ Berbeda dengan definisi umum yang sering muncul, definisi ini melihat pornografi dalam konteks potensi bahaya dan destruktifnya, yaitu subordinasi perempuan, bukan dalam konteks membangkitkan nafsu seksual. Jadi apa yang disebut sebagai pornografi bukan material grafis yang secara eksplisit seksual. Tidak semua benda grafis yang secara eksplisit seksual merupakan bentuk subordinasi perempuan. Hal ini untuk membedakan dengan material eksplisit seksual lain seperti dalam buku, film, pamflet protes, teks pendidikan, media, atau laporan kejahatan.

Dengan spesifikasi definisi ini, Alisa S. Carse mengategorikan pornografi sebagai representasi proses dehumanisasi perempuan yang diposisikan sebagai obyek, benda, dan komoditi seksual.⁹ Penghinaan, kekerasan, dan pelecehan sering hadir dalam skenario-skenario yang merusak seperti perbudakan, pelukaan, perkosaan, dan sebagainya. Feminis liberal biasanya membedakan antara 'pornografi' dan 'erotika'. Bagi mereka, erotika dipahami sebagai material yang secara seksual eksplisit tetapi disajikan berdasarkan kesetaraan, karena melukiskan perempuan sebagai peserta yang secara genuine setara dalam sebuah pertemuan seksual. Sementara itu, pornografi jelas merupakan material seksual yang nyata-nyata menjadikan perempuan sebagai obyek penindasan, kepatuhan, dominasi, dan degradasi. Posisi ini sedikit membedakan dengan kelompok moral religius yang menempatkan pornografi dan erotika dalam kategori yang sama, karena sama-sama material seksual eksplisit yang membangkitkan nafsu seksual. Sementara feminis liberal tidak begitu menaruh obyek material erotika, tetapi lebih pada pornografi. Di dalam pornografi melekat subordinasi dan represi.

Kata kunci proses subordinasi adalah degradasi dan sikap merendahkan peran dan status perempuan. Degradasi dan sikap merendahkan terjadi dalam pelukisan tingkah laku yang dimaksudkan sebagai melukai atau menciderai, menindas secara fisik dan psikis, mengabaikan dan memburukkan hasrat dan pengalaman orang lain dan menyatakannya sebagai semata-mata obyek seksual yang harus dieksploitasi dan dimanipulasi secara seksual.

Di dalam pornografi, secara eksplisit seksual perempuan direduksi pada posisi inferior atau tidak memiliki kuasa apa-apa melalui gambar

⁷ Catharine A. MacKinnon, 1999, *Sexuality, Pornography, and Method: "Pleasure under Patriarchy"*, Ethics Volume 99 Januari, hlm. 327

⁸ Catharine A. MacKinnon, 1993, *Only Words*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 121-122

⁹ Alisa L. Carse, *Pornography's Many Meanings*, Hypatia vol 14 no 1, 1999 hlm. 103

dan/atau kata-kata. Ini merupakan proses yang merendahkan martabat perempuan menjadi sebatas benda seksual (*sexual being*), makhluk satu dimensi yang kehilangan sejarah, kepribadian, harapan, kesedihan, dan cinta. Satu-satunya dimensi tersebut adalah obyek eksploitasi seksual laki-laki. Kondisi ini, dengan demikian, mengancam keselamatan dan determinasi diri perempuan.

Dalam bahasa legislasi, Andrea Dworkin dan Catherine MacKinnon,¹⁰ mengajukan delapan kondisi di mana telah terjadi diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan, yaitu (i) perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual, benda, atau komoditi, (ii) perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual yang menikmati penghinaan dan penyiksaan, (iii) perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual yang mengalami kenikmatan seksual di dalam pemerkosaan, incest, atau pemaksaan seksual dalam bentuk lain, (iv) perempuan dipresentasikan sebagai obyek seksual yang diikat, dipotong atau dimutilasi atau memar atau luka secara fisik, (v) perempuan dipresentasikan dalam postur atau posisi kepatuhan seksual, budak, atau mempertontonkan, (vi) bagian tubuh perempuan –termasuk tetapi tidak terbatas pada vagina, buah dada, atau pantat—dipertontonkan sehingga perempuan direduksi menjadi sekedar bagian ini, (vii) perempuan dipresentasikan sebagai sesuatu yang dikenai penetrasi oleh obyek-obyek dan hewan, dan (viii) perempuan dipresentasikan dalam skenario yang menurunkan martabat, penghinaan, penyiksaan, ditunjukkan sebagai kotor atau inferior, mengeluarkan darah, luka, di dalam konteks yang menjadikan kondisi seksual.

V. Memaknai Kesetaraan

Walau berangkat dari ide kesetaraan, feminis liberal dan feminis radikal menempuh jalan yang berbeda. Bagi feminis liberal memenuhi hak individu untuk berekspresi merupakan syarat bagi sebuah kesetaraan. Kesetaraan tidak mungkin diwujudkan bila hak berekspresi dan hak privasi diabaikan. Di antara hak tersebut adalah hak atas pornografi, hak perempuan atas tubuhnya sendiri, untuk membuat, mempertontonkan, mengkonsumsi, dan mempublikasikannya. Sementara itu feminis radikal melihat bahwa hak atas pornografi yang diperjuangkan oleh feminis liberal bukan merupakan ekspresi orginal, tetapi merupakan suatu bentuk ketidaksadaran terhadap sebuah sistem yang menindas yang memposisikan perempuan dalam posisi subordinasi.

Kesetaraan sebagai idealita memungkinkan kedua kelompok ini memilih jenis kesetaraan yang diinginkannya. Makna kesetaraan dalam kedua

¹⁰ Catharine A. MacKinnon, 1987, *Feminism unmodified: Discourse on life and Law*, Cambridge: Harvard University Press, hlm. 176.

kelompok tersebut menjadi asumsi yang seharusnya dipertanyakan lebih jauh, yaitu kesetaraan dalam makna apa? Dalam pengertian sebab-akibat, apakah pornografi merupakan sebab ketidaksetaraan atau ketidaksetaraan menjadi penyebab adanya pornografi? Feminis radikal nampaknya melihat ketidak-setaraan sebagai sebab munculnya pornografi. Sementara feminis liberal lebih melihat bahwa menutup akses pada pornografi justru bisa menimbulkan ketidaksetaraan.

Menurut Thelma McCormack,¹¹ kesetaraan mengacu pada dua hal, yaitu kesetaraan kesempatan dan kesetaraan kondisi. Kesetaraan kondisi mengacu pada ruang-ruang seperti tempat kerja, hubungan keluarga, pendidikan, budaya, organisasi politik dan sebagainya yang sangat plural. Sementara kesetaraan kesempatan mengacu pada hal-hal yang bisa dipilih, dicapai, atau dilaksanakan. Dua modus kesetaraan ini sebenarnya saling mengandaikan sehingga merupakan kesatuan. Untuk memperoleh kesetaraan kesempatan seseorang harus memiliki kondisi yang setara, dan kondisi yang setara memungkinkan adanya kesetaraan kesempatan. Maka tak mengherankan bila ada fenomena perlakuan khusus pada kelompok-kelompok yang tidak diuntungkan, yang justru begitu esensial untuk mencapai kesetaraan.

Bila menggunakan analisis ini, nampaknya feminis liberal lebih menekankan pada kesetaraan kesempatan, sementara feminis radikal lebih menekankan kesetaraan kondisi. Karena menuntut kesetaraan kesempatan, maka bagi feminis liberal, perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengekspresikan dirinya dan memperoleh privasi, termasuk di dalamnya hak untuk pornografi. Sementara itu, feminis radikal melihat bahwa dalam sistem patriarki perempuan tidak memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Perempuan merupakan obyek dominasi dan eksploitasi kultur dan perspektif laki-laki. Perempuan berada dalam pihak yang didefinisikan dan bukan mendefinisikan atau saling mendefinisikan. Karena tidak memiliki kesetaraan kondisi, maka kesetaraan kesempatan tidak dimungkinkan. Bahkan hak untuk pornografi justru memperkuat ketidaksetaraan.

Pesan yang harus ditangkap dari feminisme radikal, menurut McCormack,¹² adalah kesetaraan bukanlah sesuatu yang terberikan (*given*) tetapi sesuatu yang harus dicapai. Kesetaraan merupakan konsep transformatif dan bagian dari perjuangan untuk perubahan sosial yang lebih besar. Dalam konteks inilah, feminis radikal menggariskan perjuangan formal, legislatif, dan konstitusional untuk menantang sistem patriarki yang lebih luas. Sementara pesan yang ditangkap dari feminisme liberal bahwa

¹¹ Thelma McCormack, 1993, *If Pornography is the Theory, Is Inequality the Practice?*, hlm. 301

¹² Thelma McCormack, *If Pornography is the Theory, Is Inequality the Practice?*, hlm. 306

sensor negara yang berlebihan terhadap individu untuk memiliki kebebasan berekspresi justru bisa merugikan perempuan.

Satu kritik yang pantas dilontarkan adalah adanya dikotomi kebebasan dan kesetaraan dalam polemik feminis liberal dan feminis radikal. Bahwa kesetaraan dan kebebasan ekspresi bukan merupakan sesuatu yang terpisah. Ia merupakan dua sisi dari mata uang. Seseorang tidak bisa memilih salah satu, tetapi harus dua-duanya. Seseorang tidak bisa bebas berekspresi tetapi tidak memiliki kesetaraan struktural atau seseorang tidak bisa memiliki kesetaraan struktural tetapi tidak memiliki kebebasan berekspresi. Kesetaraan bukan ukuran mekanis dan legalistis tentang kondisi dan kesempatan, tetapi, demikian MacCormack, sebuah kualitas yang mencakup kebebasan untuk berpikir untuk dan tentang diri kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Carse, Alisa L. 1999. *Pornography's Many Meanings*. Hypatia Vol 14 No. 1
- Daynes, Byron W. 1995. Pornography: Freedom or Societal Degradation dalam *Social Regulatory Policy*. Raymond Tatalov & Byron W. Daynes (ed.). Boulder and London: Westview Press
- Wendy McElroy. 1997. A Feminist Defense of Pornography. *Free Inquiry Magazine*. Volume 17 nomor 4,
- MacKinnon, Catharine A. 1993. *Only Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- _____. 1999. Sexuality, Pornography, and Method: "Pleasure under Patriarchy". *Ethics*. Volume 99 Januari.
- _____. 1987. *Feminism unmodified: Discourse on life and Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- McCormack, Thelma. 1993. If Pornography is the Theory, Is Inequality the Practice?. *Philosophy of the Social Sciences*. Vol 23 No 3, September.
- Reed, Esther D. 1994. Pornography and The End of Morality. *Studies in Christian Ethics*. Volume 7 No 2.